

Evaluasi Implementasi Audit Kasus Stunting (AKS) Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Timur

Abdul Fatah Fanani¹, Ulfia Hazna Safira², Imron Rosyadi Hamid³

¹Program Magister Administrasi Publik, Universitas Wijaya Putra Surabaya, Indonesia

²Satgas Stunting Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Indonesia

³Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Indonesia

abdulfatah@uwp.ac.id

Abstract

Stunting Case Audit (AKS) is a strategic intervention under the national policy to accelerate stunting reduction in Indonesia. Its implementation at the regional level requires comprehensive evaluation. This study aims to assess the implementation of AKS in East Java Province based on the perspectives of implementers at various levels of government. A descriptive quantitative approach was employed, involving 743 respondents comprising members of Village/Kelurahan TPPS, Sub-district TPPS, District/City TPPS, Technical Teams, Expert Teams, and the Stunting Task Force. Data were collected through an online questionnaire and analyzed using descriptive statistics with the assistance of SPSS. The evaluation was guided by the Input-Process-Output model and the "5 PASTI" framework. The study found that most regions had established regulations and institutional structures for AKS. The level of support from the Stunting Reduction Acceleration Teams (TPPS) at all levels was rated high, and the overall quality of AKS implementation was considered good. However, gaps were identified in the availability and understanding of the AKS pocketbook, inconsistency in auditee selection, and uneven follow-up of AKS results. Most respondents acknowledged that AKS is highly beneficial and should be continued. The implementation of AKS in East Java has been fairly effective, though it requires strengthening in technical understanding, dissemination of guidelines, and utilization of audit results in policymaking. Recommendations focus on enhancing implementers' capacity, optimizing interventions, and expanding multisectoral funding.

Keywords: Stunting, Stunting Case Audit, Policy Evaluation, Stunting Reduction Acceleration.

Abstrak

Audit Kasus Stunting (AKS) merupakan intervensi strategis dalam kebijakan percepatan penurunan stunting yang memerlukan evaluasi menyeluruh atas implementasinya di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan AKS di Provinsi Jawa Timur berdasarkan persepsi para pelaksana di berbagai jenjang pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan jumlah responden sebanyak 743 orang, terdiri dari unsur TPPS Desa/Kelurahan, TPPS Kecamatan, TPPS Kabupaten/Kota, Tim Teknis, Tim Pakar dan Satgas Stunting. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan bantuan SPSS. Evaluasi dilakukan berdasarkan model Input-Proses-Output dan pendekatan 5 PASTI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah telah memiliki regulasi tentang AKS dan struktur kelembagaan. Tingkat dukungan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di semua tingkatan dinilai tinggi, dengan kualitas pelaksanaan AKS tergolong baik. Namun, ditemukan kesenjangan dalam kepemilikan dan

pemahaman terhadap buku saku AKS, ketidakterpaduan dalam penentuan auditee, serta ketidakmerataan pelaksanaan tindak lanjut hasil AKS. Sebagian besar responden menyatakan bahwa AKS sangat bermanfaat dan perlu dilanjutkan. Implementasi AKS di Jawa Timur telah berjalan cukup efektif, namun masih membutuhkan penguatan pada aspek pemahaman teknis, pendistribusian panduan, dan pemanfaatan hasil AKS dalam kebijakan. Rekomendasi difokuskan pada penguatan kapasitas pelaksana, optimalisasi intervensi, serta perluasan pendanaan multisektor.

Kata kunci: Stunting, Audit Kasus Stunting, Evaluasi Kebijakan, Percepatan Penurunan Stunting.

Introduction

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat paling serius di negara berkembang karena berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan produktivitas sumber daya manusia. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang masih menjadi permasalahan di dunia kesehatan hingga saat ini, laporan UNICEF, WHO, dan World Bank mengungkapkan bahwa diperkirakan sebanyak 149,2 juta balita (22%) di dunia mengalami stunting pada tahun 2020 (Phitra et al., 2023). Menurut UNICEF/WHO dan Bank Dunia, stunting mempengaruhi sekitar 151 juta anak di seluruh dunia atau 22,2% dari semua anak. Asia sendiri memiliki sekitar 83,8 juta anak yang mengalami stunting, yang sebagian besar tinggal di Asia Selatan dan Tenggara. Indonesia merupakan negara dengan prevalensi malnutrisi yang tinggi sehingga menyebabkan stunting (Syafrawati et al., 2023).

Stunting didefinisikan sebagai kondisi status gizi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang tergolong kurang jika

dibandingkan dengan umur. Pengukuran dilakukan menggunakan standar pertumbuhan anak dari WHO, yaitu dengan interpretasi stunting jika lebih dari minus dua standar deviasi median (Nirmalasari, 2020). Balita stunting dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Umumnya berbagai penyebab ini berlangsung dalam jangka waktu lama (kronik) (Trihono et al., 2015). Kondisi ini mencerminkan kegagalan pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan pada masa awal kehidupan, yang tidak hanya berpengaruh pada individu, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi nasional. Di Indonesia, stunting telah menjadi prioritas nasional dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi di bawah 14% pada tahun 2024 (Perpres No. 72 Tahun 2021, 2021). Upaya ini tidak hanya menuntut intervensi spesifik (langsung) seperti pemenuhan gizi dan layanan kesehatan dasar, tetapi juga

membutuhkan intervensi sensitif (tidak langsung) meliputi penguatan tata kelola, koordinasi lintas sektor, dan mekanisme pemantauan yang efektif di tingkat daerah. Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah Audit Kasus Stunting (AKS), yakni kegiatan evaluatif yang bertujuan mengidentifikasi akar penyebab kasus stunting secara spesifik dan menghasilkan rekomendasi perbaikan lintas sektor secara tepat sasaran. Adapun pengertian Audit Kasus Stunting (AKS) adalah identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya (Ardiana et al., 2022).

Evaluasi terhadap kebijakan percepatan penurunan stunting perlu dilakukan untuk mengetahui efektifitas dalam implementasinya. Secama umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya (William N. Dunn, 2003). Lester dan Steward (dalam Agustino, 2008) menyatakan bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Salah satu intervensi kebijakan yang menonjol dalam konteks ini adalah pelaksanaan AKS yang bertujuan mengidentifikasi faktor

penyebab langsung maupun tidak langsung dari kasus stunting di tingkat individu dan rumah tangga, serta menghasilkan rekomendasi perbaikan lintas sektor. Namun, efektivitas kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh desainnya, melainkan juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Dalam konteks ini, evaluasi kebijakan menjadi penting untuk menilai sejauh mana tujuan kebijakan tercapai, dan evaluasi implementasi menjadi bagian krusial dari evaluasi kebijakan itu sendiri.

Evaluasi implementasi AKS di tingkat daerah seperti di Provinsi Jawa Timur dapat memberikan gambaran empiris tentang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan kebijakan, termasuk bagaimana instrumen AKS digunakan, sejauh mana rekomendasi ditindaklanjuti, serta keterlibatan lintas sektor. Dengan demikian, evaluasi implementasi AKS tidak dapat dipisahkan dari evaluasi kebijakan percepatan penurunan stunting secara keseluruhan, karena hasilnya berkontribusi langsung pada pemahaman tentang keberhasilan atau hambatan dalam mencapai target nasional. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara sistematis pelaksanaan AKS di Jawa Timur tahun 2024 sebagai instrumen kebijakan yang strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting. Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk besar dan keragaman kondisi sosial-

ekonomi menjadi konteks yang penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan AKS dalam mendukung percepatan penurunan prevalensi stunting.

Meskipun kegiatan AKS telah diadopsi secara nasional dan mulai dilaksanakan di berbagai daerah, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang optimal. Berbagai laporan dan pengamatan awal menunjukkan masih adanya tantangan dalam pelaksanaan AKS, seperti keterbatasan kapasitas tim AKS, rendahnya keterlibatan lintas sektor, tidak konsistennya tindak lanjut atas rekomendasi AKS, serta lemahnya integrasi hasil AKS ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Di Provinsi Jawa Timur, yang memiliki karakteristik geografis dan demografis yang kompleks, efektivitas pelaksanaan AKS sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan stunting belum banyak dievaluasi secara sistematis. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana kegiatan AKS telah dijalankan sesuai dengan pedoman nasional, dan apakah kegiatan tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian target penurunan stunting di tingkat daerah.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kegiatan AKS dalam rangka percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Timur. Evaluasi ini

difokuskan pada aspek pelaksanaan di lapangan, meliputi kesiapan sumber daya, keterlibatan AKS audit, serta tindak lanjut hasil AKS terhadap intervensi kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas dan konsistensi pelaksanaan AKS sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan stunting di tingkat daerah.

Sejauh ini, kajian ilmiah terkait percepatan penurunan stunting di Indonesia masih didominasi oleh analisis terhadap intervensi spesifik, seperti pemberian gizi, sanitasi, dan edukasi kesehatan, sementara kajian mengenai mekanisme evaluatif kebijakan terutama AKS masih sangat terbatas. Beberapa studi deskriptif telah mencatat pelaksanaan AKS di sejumlah wilayah, namun umumnya bersifat naratif dan tidak menyertakan analisis kuantitatif terhadap proses dan kualitas implementasinya. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara khusus mengevaluasi efektivitas AKS dalam konteks kebijakan daerah, terutama di provinsi besar seperti Jawa Timur yang memiliki kompleksitas pelaksanaan program dan keragaman kapasitas antardaerah. Dengan demikian, terdapat celah penting dalam literatur yang perlu diisi melalui penelitian berbasis data yang mengukur sejauh mana kegiatan AKS benar-benar berjalan sesuai dengan rencana dan memberi dampak terhadap tata kelola percepatan penurunan stunting.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena secara khusus mengevaluasi implementasi kegiatan AKS menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dalam konteks kebijakan percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi. Berbeda dari studi sebelumnya yang umumnya bersifat kualitatif atau terbatas pada pelaporan administratif, penelitian ini menghadirkan data kuantitatif yang dapat digunakan untuk menilai kinerja implementasi secara lebih objektif dan terukur. Dengan fokus pada Provinsi Jawa Timur, penelitian ini juga memberikan kontribusi kontekstual yang relevan mengingat tingginya jumlah penduduk dan kompleksitas tata kelola daerah yang beragam. Temuan dari studi ini diharapkan dapat memperkuat dasar ilmiah dan praktis bagi perumusan kebijakan, perbaikan mekanisme pelaksanaan AKS, serta peningkatan akuntabilitas dalam program penurunan stunting, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Methods

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kegiatan AKS dalam konteks percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Timur. Menurut Sugiyono (2019), Deskriptif kuantitatif, yaitu

konsisten dengan variabel penelitian, fokus pada permasalahan aktual dan fenomena yang sedang terjadi, serta menyajikan hasil penelitian dalam bentuk angka-angka yang bermakna. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang hanya menggambarkan isi suatu variabel dalam penelitian, tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu (Sulistyawati et al., 2022). Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan AKS secara faktual, terukur, dan sistematis berdasarkan persepsi para pelaksana kebijakan di berbagai level pemerintahan.

Populasi dan Sampel

Sugiyono (2018) mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Jawa Timur, yaitu (1) Satgas Percepatan Penurunan Stunting (PPS) tingkat kabupaten/kota, (2) Tim Teknis dan Tim Pakar AKS di seluruh kabupaten/kota, (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat desa/kelurahan, (4) TPPS di tingkat kecamatan, (5) TPPS tingkat kabupaten/kota.

Responden dalam penelitian ini berjumlah 743 orang, terdiri dari (1) TPPS Desa/Kelurahan: 650 responden (87%), (2)

TPPS Kecamatan: 58 responden (8%), (3) Satgas PPS Kabupaten/Kota: 20 responden (3%), (4) Tim Teknis dan Tim Pakar AKS: 10 responden (1%), (5) TPPS Kabupaten/Kota: 5 responden (1%).

Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mendistribusikan kuesioner secara daring melalui platform survei digital kepada seluruh responden yang telah diidentifikasi. Instrumen yang digunakan telah disusun berdasarkan indikator implementasi program AKS, serta diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan dalam pengumpulan data utama.

Pendekatan analisis yang digunakan mencakup dua kerangka evaluatif, yaitu (1) Model Input-Proses-Output (IPO), yang digunakan untuk menilai komponen sumber daya, pelaksanaan AKS, serta hasil dan tindak lanjut dari kegiatan AKS, (2) Pendekatan 5 PASTI, yang digunakan sebagai kerangka logis untuk menilai kualitas implementasi di lapangan, meliputi (a) Memastikan penentuan target sasaran dilakukan secara tepat, (b) Memastikan target sasaran tercatat dalam daftar intervensi, (c) Memastikan sasaran menerima layanan sesuai program, (d) Memastikan pemanfaatan program sesuai kebutuhan, (f) Memastikan pelaporan program dilakukan akurat dan tepat waktu.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif menggunakan SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*). Analisis dilakukan dalam bentuk statistik deskriptif, yang mencakup distribusi frekuensi, persentase, rerata, dan standar deviasi, guna menggambarkan profil pelaksanaan AKS dan persepsi para pelaksana terhadap masing-masing indikator implementasi.

Result and Discussion

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan total 743 responden dari berbagai elemen pelaksana kegiatan AKS di Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar responden berasal dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat desa/kelurahan sebanyak 650 orang (87%), disusul TPPS kecamatan sebanyak 58 orang (8%), Satgas PPS kabupaten/kota sebanyak 20 orang (3%), Tim Teknis dan Tim Pakar sebanyak 10 orang (1%), serta TPPS kabupaten/kota sebanyak 5 orang (1%). Komposisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan pelaku implementasi di tingkat paling operasional (desa/kelurahan) sangat dominan dalam proses AKS. Hal ini sejalan dengan struktur kebijakan percepatan penurunan stunting yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pelaksanaan intervensi. Namun, dominasi responden dari tingkat desa/kelurahan juga mengisyaratkan pentingnya memperkuat

komunikasi vertikal dari tingkat kabupaten/kota agar kebijakan dan informasi teknis dapat diterima secara utuh dan merata.

Kepemilikan Regulasi Audit Kasus Stunting

Hasil analisis menunjukkan bahwa 97% responden menyatakan kabupaten/kotanya telah memiliki regulasi terkait pelaksanaan AKS, sementara 3% lainnya menyatakan belum. Meskipun secara administratif seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur telah memiliki regulasi AKS sebagaimana dilaporkan oleh TPPS Provinsi hasil ini mencerminkan adanya kesenjangan pemahaman atau ketidakterjangkauan informasi pada sebagian pelaksana, terutama di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya diseminasi regulasi dari tingkat kabupaten/kota ke tingkat bawah. Selain itu, ada kemungkinan bahwa regulasi yang dimaksud belum dikomunikasikan dengan baik atau tidak disertai dokumen pendukung yang menjelaskan teknis implementasi secara rinci. Dalam konteks kebijakan publik, pemahaman terhadap regulasi bukan hanya menyangkut keberadaannya, tetapi juga penyebarannya, pemahamannya, dan kemampuan pelaksana untuk menindaklanjutinya dalam bentuk aksi konkret.

Kepemilikan SK Tim Audit Kasus Stunting

Hasil analisis serupa juga ditemukan dalam hal kepemilikan Surat Keputusan (SK)

pembentukan Tim AKS, di mana 97% responden menyatakan bahwa SK telah tersedia, dan 3% menyatakan sebaliknya. Sekilas data ini menunjukkan komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam membentuk struktur pelaksana AKS sesuai dengan ketentuan nasional. Namun, seperti halnya regulasi, kesenjangan pemahaman terhadap eksistensi dan fungsi SK ini tetap menjadi perhatian.

Kurangnya pengetahuan sebagian responden terhadap keberadaan SK dapat mencerminkan dua hal: pertama, rendahnya akses informasi administratif ke tingkat pelaksana; dan kedua, terbatasnya pelibatan langsung dalam proses pembentukan tim, sehingga pelaksana di lapangan merasa tidak terhubung dengan struktur formal yang telah dibentuk. Untuk itu, perlu penguatan koordinasi dan pelatihan berjenjang agar keberadaan SK tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga menjadi landasan operasional yang dipahami dan dijalankan secara kolektif.

Dukungan TPPS Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Audit Kasus Stunting

Sebagian besar responden (98%) menilai bahwa TPPS Kabupaten/Kota selalu memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan AKS, sementara 2% menyatakan dukungan hanya kadang-kadang diberikan, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak adanya dukungan sama sekali. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara

umum peran TPPS Kabupaten/Kota sudah sejalan dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, khususnya dalam hal koordinasi lintas sektor dan fasilitasi teknis. Namun, keberadaan 2% responden yang menilai dukungan belum konsisten menunjukkan perlunya peningkatan mekanisme koordinasi dan monitoring kinerja TPPS di level ini. Kualitas dukungan yang tidak merata berpotensi menciptakan disparitas efektivitas pelaksanaan AKS antarwilayah.

Dukungan TPPS Kecamatan dalam Penyelenggaraan Audit Kasus Stunting

Responden juga memberikan penilaian tinggi terhadap peran TPPS Kecamatan, dengan 99% menyatakan dukungan selalu diberikan dan hanya 1% menyatakan dukungan bersifat tidak konsisten. Data ini menunjukkan bahwa struktur TPPS di tingkat kecamatan telah menjalankan fungsi fasilitasi dan penghubung antara kebijakan kabupaten/kota dengan pelaksanaan di desa/kelurahan secara cukup baik. TPPS Kecamatan memiliki peran penting dalam menyampaikan arahan teknis, mengawal pelaksanaan tahapan AKS, serta melakukan supervisi atas tindak lanjut di tingkat desa. Oleh karena itu, mempertahankan dan memperkuat konsistensi peran TPPS Kecamatan menjadi kunci dalam menjaga efektivitas dan keselarasan pelaksanaan AKS secara menyeluruh.

Dukungan TPPS Desa/Kelurahan dalam Penyelenggaraan Audit Kasus Stunting

Sebanyak 97% responden menyatakan bahwa TPPS Desa/Kelurahan selalu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan AKS, sementara 3% menyatakan dukungan hanya diberikan sesekali. Tidak ada responden yang menyatakan ketidakhadiran dukungan sama sekali. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari pelaksana di level terbawah, yang berperan langsung dalam pengumpulan data, verifikasi kasus, serta pelaksanaan intervensi. Namun demikian, adanya 3% responden yang menilai dukungan tidak konsisten menandakan bahwa faktor-faktor seperti beban kerja, kapasitas sumber daya manusia, dan pemahaman teknis terhadap AKS masih perlu diperkuat. Mengingat posisi strategis desa sebagai ujung tombak intervensi stunting, penguatan kapasitas TPPS Desa/Kelurahan secara berkelanjutan perlu menjadi prioritas.

Persepsi terhadap Kecukupan Dana BOKB

Sebanyak 79% responden menyatakan bahwa dana BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) dirasa cukup untuk mendukung penyelenggaraan AKS, sementara 13% menyatakan kurang, dan sisanya menyatakan tidak tahu atau tidak merespons. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota tidak menghadapi hambatan anggaran yang signifikan dalam pelaksanaan AKS. Namun demikian, masih adanya

responden yang merasakan kekurangan dana menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap alokasi, distribusi, dan efisiensi penggunaan dana BOKB.

Untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran, perencanaan program berbasis kebutuhan riil dan pelaksanaan monitoring keuangan secara berkala sangat penting. Selain itu, pelibatan sektor swasta melalui forum CSR di daerah dapat menjadi strategi pelengkap untuk menutupi celah pendanaan, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya.

Persepsi terhadap Sumber Dana Tambahan

Sebanyak 47% responden menyatakan bahwa terdapat sumber dana lain selain BOKB yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan AKS. Temuan ini menunjukkan bahwa sejumlah kabupaten/kota telah melakukan inovasi pendanaan dengan memanfaatkan dana dari APBD, kemitraan dengan sektor swasta, atau bantuan donor. Namun, 27% menyatakan tidak ada sumber dana lain dan 26% menyatakan tidak tahu. Data ini mengindikasikan pentingnya peningkatan literasi keuangan di tingkat pelaksana agar berbagai potensi pendanaan dapat dioptimalkan secara maksimal.

Ketersediaan Sarana Prasarana

Sebanyak 84% responden menilai sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan AKS sudah cukup, 14% menyatakan kurang, dan 2% menyatakan tidak

tersedia. Meskipun mayoritas menilai sarana prasarana mencukupi, adanya sebagian yang menilai kurang menunjukkan perlunya pemetaan ulang fasilitas yang tersedia, terutama di daerah terpencil. Penyediaan alat bantu teknis, perangkat dokumentasi, dan akses teknologi menjadi penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan AKS di semua tahapan.

Persepsi terhadap Sumber Dana Tambahan

Sebanyak 47% responden menyatakan bahwa terdapat sumber dana lain selain BOKB yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan AKS. Temuan ini menunjukkan bahwa sejumlah kabupaten/kota telah melakukan inovasi pendanaan dengan memanfaatkan dana dari APBD, kemitraan dengan sektor swasta, atau bantuan donor. Namun, 27% menyatakan tidak ada sumber dana lain dan 26% menyatakan tidak tahu. Data ini mengindikasikan pentingnya peningkatan literasi keuangan di tingkat pelaksana agar berbagai potensi pendanaan dapat dioptimalkan secara maksimal.

Kepemilikan Buku Saku Audit Kasus Stunting

Hanya 51% responden yang menyatakan memiliki Buku Saku AKS, sementara 49% lainnya tidak memiliki. Buku saku tersebut merupakan instrumen penting karena berisi panduan teknis, tahapan pelaksanaan, dan kriteria intervensi. Ketimpangan kepemilikan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam

distribusi dan diseminasi dokumen pendukung di tingkat pelaksana. Padahal, pemahaman yang merata terhadap pedoman pelaksanaan menjadi fondasi penting dalam menjamin mutu dan konsistensi implementasi AKS.

Distribusi yang belum merata dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan teknis, lemahnya komunikasi lintas jenjang, atau keterbatasan logistik. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi penyaluran berbasis kebutuhan dan pelatihan terpadu untuk memastikan seluruh pelaksana memiliki akses terhadap informasi dan panduan yang sama.

Kemudahan Memahami Buku Saku Audit Kasus Stunting

Dari responden yang menyatakan memiliki buku saku, sebagian besar menilai buku tersebut mudah (42%) atau sangat mudah (9%) untuk dipahami. Namun, 48% responden tidak memiliki buku, dan 1% menyatakan sulit dipahami. Meskipun mayoritas menilai kontennya mudah dicerna, tingginya jumlah yang tidak memiliki buku menegaskan kembali pentingnya diseminasi. Buku panduan harus tidak hanya tersedia, tetapi juga didampingi dengan pelatihan dan sesi pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman teknis dan praktis pelaksana AKS.

Kesesuaian Waktu Pelaksanaan AKS dengan Kalender

Sebagian besar responden (95%) menyatakan bahwa pelaksanaan AKS telah sesuai dengan kalender yang ditetapkan, sementara 5% menyatakan ketidaksesuaian. Data ini menunjukkan tingkat kedisiplinan waktu yang cukup tinggi dalam pelaksanaan program, namun tetap diperlukan evaluasi berkala terhadap kabupaten/kota yang belum sinkron. Konsistensi waktu pelaksanaan audit penting untuk menjamin akurasi data, koordinasi lintas sektor, dan efektivitas intervensi.

Ketidaksesuaian pelaksanaan bisa terjadi akibat keterlambatan anggaran, rendahnya kapasitas pelaksana, atau kendala administratif lainnya. Oleh karena itu, advokasi teknis dan pendampingan perlu dilakukan secara intensif di daerah-daerah dengan kepatuhan waktu rendah.

Persepsi Responden terhadap Data yang Digunakan dalam Penentuan Auditee

Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif, ditemukan bahwa mayoritas responden, yaitu sebesar 97%, menyatakan bahwa data yang digunakan dalam penentuan auditee telah sesuai. Hanya 3% responden yang menyatakan bahwa data yang digunakan tidak sesuai.

Hasil ini mencerminkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap validitas dan relevansi data yang digunakan dalam proses identifikasi kasus stunting yang diaudit. Secara normatif, penentuan auditee dalam AKS semestinya mengacu pada data yang akurat,

terbarukan, dan bersumber dari sistem informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti e-PPGBM, SIGA, dan data surveilans. Tingginya persentase responden yang menyatakan kesesuaian data menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah telah menjalankan proses identifikasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan AKS.

Namun demikian, keberadaan 3% responden yang menyatakan data tidak sesuai tetap menjadi perhatian. Persentase kecil ini bisa mencerminkan adanya disparitas kualitas data di tingkat akar rumput, keterlambatan pemutakhiran data, atau lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengumpulan dan verifikasi data. Hal ini sejalan dengan temuan dalam berbagai studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa tantangan dalam pengelolaan data sering kali menjadi penghambat dalam pelaksanaan intervensi berbasis bukti di sektor kesehatan masyarakat.

Dalam konteks kebijakan percepatan penurunan stunting, kualitas data sangat menentukan efektivitas intervensi. Ketepatan data auditee tidak hanya mempengaruhi akurasi identifikasi kasus, tetapi juga berdampak langsung pada relevansi rekomendasi dan tindak lanjut lintas sektor. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas dalam pengelolaan dan integrasi data stunting, khususnya di tingkat desa dan kecamatan, menjadi sangat krusial.

Sebagai implikasi kebijakan, hasil ini menggarisbawahi pentingnya pelatihan teknis berkala bagi pelaksana AKS di lapangan, serta penyempurnaan mekanisme verifikasi dan validasi data sebelum proses AKS dimulai. Di samping itu, perlu ada evaluasi berkala terhadap sistem informasi yang digunakan dalam penentuan auditee, agar tetap responsif terhadap dinamika kasus stunting di lapangan.

Persepsi Responden terhadap Proses Penentuan Auditee

Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap proses penentuan auditee dalam AKS cukup beragam. Sebanyak 54% responden menilai proses tersebut sangat baik, diikuti oleh 26% yang menilai baik, 13% cukup, 3% tidak baik, dan 4% sangat tidak baik. Tingginya persentase responden pada kategori *sangat baik* dan *baik* (total 80%) menunjukkan bahwa secara umum, proses penentuan auditee telah berjalan dengan prosedur yang dianggap tepat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh mayoritas pelaksana. Hal ini memberi indikasi bahwa mekanisme identifikasi kasus stunting yang akan diaudit, baik berdasarkan data status gizi, faktor risiko, maupun rekomendasi dari tingkat desa/kelurahan telah diimplementasikan secara konsisten di sebagian besar wilayah.

Namun demikian, temuan sebesar 13% responden yang menilai proses tersebut cukup, serta 7% yang menyatakan tidak baik hingga sangat tidak baik, perlu menjadi perhatian

serius. Persentase ini mengindikasikan adanya variasi dalam pelaksanaan proses penentuan auditee, yang dapat mencerminkan sejumlah tantangan, seperti ketidakterpaduan sumber data yang digunakan, kurangnya pemahaman teknis terhadap kriteria pemilihan auditee, dominasi pendekatan administratif daripada pendekatan berbasis risiko, atau keterbatasan koordinasi lintas sektor dalam proses penetapan kasus.

Dalam konteks evaluasi kebijakan publik, hal ini memperkuat pentingnya standarisasi mekanisme identifikasi auditee di seluruh daerah, disertai dengan pelatihan teknis dan penguatan kapasitas pada level pelaksana. Variasi persepsi ini juga dapat menjadi refleksi dari ketimpangan dukungan sistem informasi atau ketersediaan data di masing-masing wilayah, yang secara tidak langsung memengaruhi objektivitas penentuan kasus.

Oleh karena itu, perlu disusun pedoman teknis yang lebih operasional dan adaptif, yang tidak hanya menjelaskan *apa* kriteria penentuan auditee, tetapi juga *bagaimana* proses tersebut dijalankan secara partisipatif, terintegrasi, dan berbasis data yang valid. Penguatan supervisi dan evaluasi terhadap proses ini juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas AKS secara keseluruhan.

Persepsi Responden terhadap Kinerja Tim Teknis Audit Kasus Stunting

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebesar 99% responden menilai kinerja Tim Teknis Audit Kasus Stunting (AKS) telah baik, sementara 1% responden menyatakan kinerja tersebut belum baik. Persentase ini mengindikasikan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi terhadap peran dan kontribusi Tim Teknis dalam proses pelaksanaan AKS di berbagai wilayah.

Tim Teknis memiliki fungsi strategis dalam proses AKS, mulai dari pengumpulan dan analisis data kasus, validasi informasi, hingga penyusunan rekomendasi intervensi yang kontekstual. Tingginya apresiasi terhadap kinerja mereka menunjukkan bahwa secara umum, kompetensi teknis, kolaborasi lintas sektor, dan profesionalisme Tim Teknis dianggap memadai oleh para pelaksana di lapangan. Hal ini menjadi indikator positif bahwa kapasitas teknis dalam sistem penanganan stunting di daerah mulai terbentuk secara sistematis.

Namun demikian, adanya 1% responden yang menyatakan kinerja belum baik tetap memerlukan perhatian, karena dapat mencerminkan adanya tantangan spesifik di wilayah tertentu, seperti keterbatasan jumlah tenaga ahli, kurangnya pelatihan teknis, atau lemahnya koordinasi antar anggota tim teknis. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, variabilitas ini penting untuk dicermati, karena

keberhasilan AKS sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di tingkat mikro.

Temuan ini sejalan dengan studi-studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan AKS sangat dipengaruhi oleh kualitas tim pelaksana. Sebagaimana dicatat oleh Muscat dan kawan-kawan (2020) bahwa efektivitas intervensi berbasis audit sangat bergantung pada kejelasan peran, kapasitas teknis, dan konsistensi dalam menjalankan prosedur. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan pelatihan berkelanjutan untuk Tim Teknis tetap menjadi agenda penting, khususnya dalam menghadapi dinamika kasus stunting yang kompleks dan multifaktor.

Dari perspektif kebijakan, hasil ini menunjukkan bahwa intervensi penguatan teknis telah menunjukkan dampak positif, namun masih diperlukan mekanisme monitoring kinerja yang lebih sistematis agar kualitas pelaksanaan AKS tetap terjaga secara merata antar wilayah. Pengembangan sistem umpan balik internal dan supervisi lapangan dapat menjadi strategi pelengkap untuk memastikan bahwa Tim Teknis tidak hanya bekerja sesuai pedoman, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan lokal.

Persepsi Responden terhadap Kinerja Tim Pakar Audit Kasus Stunting

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa 98% responden menilai kinerja Tim Pakar dalam AKS sudah baik, sementara 2%

menyatakan bahwa kinerja Tim Pakar belum memadai. Temuan ini menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dari para pelaksana lapangan terhadap kontribusi Tim Pakar dalam keseluruhan proses AKS.

Sebagai bagian dari struktur kelembagaan dalam AKS, Tim Pakar memiliki peran kunci dalam memberikan analisis mendalam, validasi ilmiah terhadap faktor risiko, serta rekomendasi berbasis keahlian multidisipliner. Tingginya tingkat apresiasi dari responden mencerminkan bahwa peran tersebut telah dijalankan secara efektif dalam konteks lokal. Hal ini juga menjadi indikator bahwa proses seleksi dan pelibatan pakar dengan kompetensi yang relevan telah berjalan sesuai kebutuhan daerah.

Namun, adanya 2% responden yang menyatakan kinerja Tim Pakar belum baik perlu menjadi catatan penting, karena hal ini dapat mengindikasikan adanya kesenjangan dalam penerapan fungsi pakar di beberapa wilayah. Kemungkinan penyebabnya dapat meliputi keterbatasan jumlah pakar yang tersedia, kurang optimalnya komunikasi antara Tim Pakar dan Tim Teknis, atau terbatasnya waktu keterlibatan pakar dalam siklus AKS. Dalam konteks ini, penguatan peran Tim Pakar bukan hanya soal kehadiran, tetapi juga kualitas kontribusi mereka dalam memperkaya perspektif dan solusi.

Dengan demikian, rekomendasi yang dapat diajukan adalah memperjelas mandat Tim Pakar, memastikan keterlibatan mereka sejak

awal hingga tindak lanjut hasil AKS, serta menyediakan dukungan logistik dan administratif yang memadai. Penguatan kolaborasi antara Tim Pakar, Tim Teknis, dan pemangku kebijakan daerah juga menjadi langkah strategis agar hasil AKS tidak hanya valid secara teknis, tetapi juga relevan dan dapat diimplementasikan secara operasional.

Kualitas Tahapan Audit Kasus Stunting

Sebanyak 83% responden menilai kualitas setiap tahapan AKS berada pada kategori sangat baik dan baik. Hal ini mencerminkan bahwa prosedur AKS telah dijalankan secara sistematis dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun, adanya 15% responden yang menilai pelaksanaan tahapan masih cukup atau kurang baik mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas teknis pelaksana, termasuk bimbingan teknis dan supervisi rutin.

Kualitas tahapan AKS sangat menentukan keakuratan identifikasi masalah, kelayakan rekomendasi, serta keberhasilan tindak lanjut. Oleh karena itu, penguatan aspek dokumentasi, penjadwalan, dan pelaporan menjadi strategi penting untuk menjaga mutu pelaksanaan AKS di seluruh wilayah.

Penentuan dan Kepastian Auditee dalam Intervensi

Sebagian besar responden (80%) menilai proses penentuan auditee dan kepastian masuknya ke dalam daftar sasaran intervensi sudah sangat baik hingga baik. Namun masih

terdapat sekitar 6% responden yang menilai proses ini tidak berjalan optimal. Ketidaktepatan penentuan auditee bisa berdampak pada ketidaksesuaian intervensi, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas program.

Evaluasi terhadap kriteria dan mekanisme pemilihan auditee sangat diperlukan, termasuk penyelarasan data KRS, e-PPGBM, serta hasil verifikasi lapangan. Pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi sistem data menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung transparansi dan ketepatan sasaran.

Implementasi Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Mayoritas responden menyatakan bahwa rekomendasi hasil AKS telah ditindaklanjuti dengan baik oleh TPPS Kabupaten/Kota, namun terdapat sekitar 6% responden yang menilai belum optimal. Ini mengindikasikan perlunya penguatan dalam hal akuntabilitas dan pengawasan tindak lanjut AKS.

Rekomendasi yang dihasilkan dari AKS seharusnya menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan dan intervensi lanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hasil AKS tidak hanya terdokumentasi, tetapi juga menjadi bagian dari siklus perencanaan pembangunan daerah.

Pemanfaatan Hasil AKS untuk Penentuan Kebijakan

Sebagian besar responden (93%) menyatakan sangat setuju atau setuju bahwa hasil AKS dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan percepatan penurunan stunting. Ini mencerminkan bahwa AKS sudah mulai berperan sebagai instrumen berbasis bukti dalam perumusan kebijakan daerah.

Namun agar manfaat ini optimal, perlu penguatan kelembagaan, integrasi lintas sektor, serta pelatihan pemanfaatan data AKS untuk pengambil kebijakan. Monitoring pemanfaatan hasil AKS sebagai acuan kebijakan menjadi langkah strategis dalam menjamin keberlanjutan dampak AKS.

Conclusion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kegiatan AKS di Provinsi Jawa Timur telah berjalan dengan tingkat dukungan dan komitmen yang tinggi dari berbagai unsur TPPS, baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa/kelurahan. Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah tantangan yang perlu diperbaiki, seperti ketimpangan informasi terkait regulasi dan SK, distribusi dan pemahaman buku saku, variasi dalam kualitas pelaksanaan AKS, serta belum optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi AKS.

Mayoritas responden menilai bahwa AKS telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung percepatan penurunan stunting,

baik melalui identifikasi kasus, rekomendasi intervensi, maupun perumusan kebijakan berbasis bukti. Namun, efektivitas jangka panjang dari program ini sangat ditentukan oleh penguatan tata kelola, konsistensi pelaksanaan, integrasi data, dan pemanfaatan hasil AKS dalam pengambilan keputusan.

Rekomendasi

Penguatan Diseminasi dan Sosialisasi Regulasi

TPPS Kabupaten/Kota perlu memastikan bahwa regulasi dan SK AKS tersampaikan secara menyeluruh hingga tingkat desa/kelurahan, disertai dengan pemahaman teknis yang memadai.

Peningkatan Distribusi dan Pelatihan Buku Saku AKS

Buku saku perlu didistribusikan secara merata dan dijadikan materi utama dalam pelatihan teknis berjenjang agar implementasi AKS seragam dan berkualitas.

Penguatan Proses Penentuan dan Pemantauan Audit

Proses penentuan auditee harus berbasis data yang valid dan terintegrasi, serta didukung oleh mekanisme pelaporan yang transparan.

Optimalisasi Tindak Lanjut Rekomendasi AKS

Setiap hasil AKS perlu diintegrasikan ke dalam rencana kegiatan dan kebijakan daerah, dengan penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.

Diversifikasi dan Efisiensi Pendanaan

Pemanfaatan sumber dana alternatif selain BOKB perlu diperluas, termasuk mendorong keterlibatan sektor swasta melalui skema CSR daerah.

Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Lintas Sektor

Diperlukan penguatan koordinasi antarsektor dan peningkatan kapasitas SDM TPPS di semua tingkatan melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta platform berbagi praktik baik.

Dengan rekomendasi ini, diharapkan pelaksanaan AKS di Jawa Timur dapat lebih terstruktur, efektif, dan berdampak nyata dalam menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan.

References

- Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. *Bandung: Alfabeta*.
- Ardiana, I., Elviana, A., Murniati, C., & Nafsi, I. (2022). Buku Saku Audit Kasus Stunting. *Direktorat Bina Keluarga Balita Dan Anak BKKBN*, 1–456.
- Muscat, D. M., Ayre, J., Nutbeam, D., Harris, A., Tunchon, L., Zachariah, D., & McCaffery, K. J. (2020). Embedding a Health Literacy Intervention Within

Established Parenting Groups: An Australian Feasibility Study. *Health Literacy Research and Practice*, 4(1), e67–e78.
<https://doi.org/10.3928/24748307-20200217-01>

Nirmalasari, N. O. (2020). Stunting Pada Anak : Penyebab dan Faktor Risiko Stunting di Indonesia. *Qawwam: Journal For Gender Mainstreming*, 14(1), 19–28.
<https://doi.org/10.20414/Qawwam.v14i1.2372>

Perpres No. 72 Tahun 2021. (2021). Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. In *Lembaran Negara RI* (Issue 1, pp. 1–75).

Phitra, F. A., Lipoeto, N. I., & Yetti, H. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Desa Lokus Stunting Kabupaten Merangin Tahun 2022. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(3), 127.
<https://doi.org/10.22146/jkki.85424>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. *ALFABETA*, Cv.

Sulistyawati, W., Wahyudi, & Trinuryono, S. (2022). Analisis (Deskriptif Kuantitatif) Motivasi Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Blended Learning Saat Pandemi Covid-19 (Deskriptif Kuantitatif Di Sman 1 Babadan Ponorogo). *Kadikma*, 13(1), 68.
<https://doi.org/10.19184/kdma.v13i1.31327>

Syafrawati, S., Lipoeto, N. I., Masrul, M., Novianti, N., Gusnedi, G., Susilowati, A., Nurdin, A., Purnakarya, I.,

Andrafikar, A., & Umar, H. B. (2023). Factors driving and inhibiting stunting reduction acceleration programs at district level: A qualitative study in West Sumatra. *PLoS ONE*, 18(3 MARCH), 1–21. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283739>

Trihono, Tjandrarini, D. H., Irawati, A., Utami, N. H., Tejayanti, T., & Nurlinawati, I. (2015). *Pendek (Stunting) di Indonesia, Masalah dan Solusinya* (M. Sudomo (ed.)). Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

William N. Dunn. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (M. Darwin (ed.); Edisi 2). Gajah Mada University Press.

Profile

First author profile

Abdul Fatah Fanani lahir di Ngawi 9 Agustus 1971. Menyelesaikan pendidikan SD sampai SMA di Ngawi, melanjutkan S1, S2, dan S3 di Fakultas Ilmu Administrasi (Adm. Publik) Universitas Brawijaya. Penulis aktif melakukan penelitian dan publikasi pada beberapa jurnal nasional. Saat ini penulis adalah Dosen tetap di Program Magister Administrasi Publik Universitas Wijaya Putra Surabaya. Email: fafan.fanani@gmail.com, HP. 081233456730, alamat: Dedaun Residence D3/9 Ds. Pendem, Junrejo, Batu.

Second author profile

Ulfia Hazna Safira lahir di Blitar 8 Januari 1995. Pendidikan dasar dan menengah ditempuh di Blitar, kemudian melanjutkan studi S1 dan S2 di Fakultas Kesehatan masyarakat Universitas Airlangga Surabaya pada program studi Administrasi dan Kebijakan. Aktif melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah yang dipublikasikan di beberapa jurnal nasional.